

## Terjerat Narkoba, Vokalis Deadsquad Mengaku Stres dan Banyak Tekanan

JAKARTA (IM) - Vokalis band metal Deadsquad, Daniel Mardhany, diamankan polisi karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika. Daniel mengaku menggunakan barang haram tersebut karena stres. "Saya stres, karena banyak tekanan, stres," kata Daniel di Polres Metro Jakarta Utara, Senin (3/5).

Daniel kemudian mengungkapkan rasa penyesalannya telah menggunakan narkoba.

"Saya menyesal telah menggunakan narkoba. Dan kasus ini membuat saya jera. Dan buat teman-teman jangan menggunakan narkoba karena akan menguancurkan hidup kalian. Pesan saya seperti itu," ucap Daniel.

Selain Daniel, polisi juga menangkap AA yang diketahui sebagai mantan additional drummer Deadsquad.

Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya tindakan penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di kawasan Tangerang Selatan.

Ketika mendatangi lokasi, polisi mendapati AA sedang menggunakan narkotika.

"Kami bergerak menuju ke lokasi dan benar pada Sabtu (1/5) pukul 16.00 WIB telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saudara AA," tutur Kapolres Metro Jakarta Utara Kompol Guruh Arif Darmawan.

"Bersamaan dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka AA ditemukan barang bukti jenis tembakau sintetis dan obat prohiper atau metil fenidat, psikotropika golongan 2," lanjutnya.

Saat diinterogasi, AA mengaku mendapatkan barang tersebut dari tangan DM. Polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap DM di kediamannya pada hari yang sama. Dari hasil tes urine, keduanya dinyatakan positif menggunakan ganja.

Polisi mengamankan barang bukti dari AA 2,57 gram tembakau sintetis sedangkan dari DM ditemukan 1 butir obat prohiper atau metil fenidat. Guruh menambahkan, Daniel telah menggunakan narkoba selama satu tahun sedangkan AA selama empat tahun. ● lus

## Konser Musik di Cilandak Timur Tak Berizin, Kapolres: Izinnya Bazar UMKM Ramadhan

JAKARTA (IM) - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah menegaskan bahwa konser musik di Cibis Park, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tak berizin. Izin yang ada adalah untuk kegiatan bazar UMKM Ramadhan.

Azis menjelaskan bahwa kegiatan konser musik tersebut merupakan inisiatif seorang penyelenggara bazar.

"Kami sudah konfirmasi ke beberapa orang dan didapatkan keterangan yaitu memang benar ada kegiatan selama bulan Ramadhan dimulai tanggal 13 (April) lalu. Itu bentuknya adalah kegiatan bazar UMKM," ujar Azis di Mapolres Jakarta Selatan, Senin (3/5) siang.

Namun karena kegiatan bazar UMKM sepi pengunjung setelah beberapa hari digelar, lalu pihak penyelenggara bazar meminta bantuan salah satu tenant untuk meramaikan bazar UMKM.

"Jadi awal mulanya adalah kegiatan bazar UMKM, namun karena dirasa sepi, kemudian beberapa saat ber-

lalu maka pada 1 Mei 2021, sekitar setelah berbuka puasa dilakukan kegiatan musik dan akhirnya viral," kata Azis.

Ja mengesakan, izin awal yang disampaikan oleh penyelenggara adalah kegiatan bazar UMKM. Adapun peserta bazar UMKM merupakan pedagang makanan. "Sekali lagi, izinnya adalah izin kegiatan bazar UMKM. Di sana jual ayam bakar, sate taichan, teh tarik. Dari tahun ke tahun rutin seperti itu," tambah Azis.

Sebelumnya, konser musik di area Cibis Park itu menimbulkan kerumunan. Para penonton terlihat melanggar protokol kesehatan. Mereka tak memakai masker dan menjaga jarak. Mereka dengan asyik berjingkrak dan melompat ke sana ke sini.

Video konser musik di Cibis Park diunggah oleh pemilik akun @teluulur lalu viral di media sosial. Dalam keterangan video tertulis, "Konser musik & Pasar Malam pertama di Jakarta selama pandemi, tepatnya di Cibis Park, Cilandak, 1 Mei 2021." ● lus



## PENYEMPROTAN DISINFECTAN DI PEKANBARU

Sejumlah kendaraan taktis Armoured Water Canon (AWC) Polda Riau dan Polresta Pekanbaru melakukan penyemprotan disinfektan di Jalan Sudirman Pekanbaru, Riau, Senin (3/5). Penyemprotan disinfektan dilakukan disejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru guna mencegah meluasnya penularan Covid-19 yang semakin meningkat di kota tersebut.

## Polisi: Masyarakat Papua Tak Perlu Khawatir Setelah KKB Disebut Teroris

JAKARTA (IM) - Mabes Polri sebut warga Papua tak perlu khawatir setelah pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris.

"Masyarakat di Papua tak perlu khawatir dengan keberadaan KKB," kata Kadiv Humas Polri Irijen Argo Yuwono saat dihubungi, Jakarta, Senin (3/5).

Sebab, Argo memastikan bahwa personel TNI-Polri yang bertugas di Papua akan menjamin keamanan warga sipil dari setiap serangan kelompok tersebut.

Pengamanan akan terus dilakukan terhadap setiap warga tanpa memandang identitas maupun asal daerah masyarakat yang menetap di Tanah Cendrawasih.

"TNI-Polri akan menjaga dan mengawal warganya dalam bingkai NKRI di tanah Papua," ujar Argo.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi

teroris (DTTOT).

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam jumpa persnya, Kamis (29/4).

Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. Hal itu mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme.

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan, pandangan dan sikap pemerintah tersebut, karena tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir ini semakin meresahkan.

"Banyak tokoh adat Papua datang ke menko polhukam dan pimpinan daerah di sana menyatakan dukungan pemerintah melakukan tindakan diperlukan guna menanganai tindak kekerasan yang muncul di Papua," kata Mahfud. ● lus

# 12 | PoliceLine

FOTO/ANT



## KASUS SATE BERACUN DI YOGYA

Polisi menunjukkan NA (25) warga Majalengka terduga pelaku pengiriman sate beracun yang menewaskan Naba Faiz Prasetya (10) saat rilis kasus di Polres Bantul, D.I Yogyakarta, Senin (3/5). Naba meninggal dunia akibat keracunan setelah menyangkap sate yang dibawa ayahnya Bandiman, seorang pengemudi ojek daring, yang sebelumnya mendapatkan orderan untuk mengantarkan makanan sate tersebut.

# Polisi Paling Banyak Diadukan Soal Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Polri meminta publik tidak menyamaratakan bahwa semua anggota Polri melakukan kekerasan. Kalau ada anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan, itu hanya oknum.

JAKARTA (IM) - Kepolisian RI menjadi lembaga yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang tahun 2020. Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Beka menyebut, aduan yang diterima Komnas HAM di antaranya soal lambannya penanganan kasus, dugaan

kriminalisasi, proses hukum tidak sesuai prosedur, dan dugaan kekerasan.

"Dari situasi umum HAM, polisi tetap menjadi lembaga yang paling banyak diadukan terhadap publik," kata Beka dalam 'Peluncuran Catatan AJI atas Situasi Kebebasan Pers Indonesia 2021' yang dilaksanakan secara daring, Senin (3/5).

## Viral, Polisi Gondrong Tilang Sejumlah Pengendara Motor

JAKARTA (IM) - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan video viral seorang polisi lalu lintas (polantas) berambut gondrong yang mencoba menilang pemotor di jalan raya.

Kejadian itu terekam oleh netizen dan diposting ulang oleh akun instagram @jakarta\_zone, Senin (3/5) dini hari tadi.

"Lolos dari sanksi tilang, jangan ditiru ya, Sob!," tulisnya dalam caption.

Dalam video yang kini

telah ditonton 75 ribu pengguna instagram itu memperlihatkan bagaimana seorang pemotor yang menggunakan helm warna merah awalnya menghindari tilang pria berambut gondrong yang memakai rompi bertulis polisi.

Sempat menghindari, namun pria dicurigai polisi itu langsung menarik sepeda motornya dan berusaha menghalangi pemotor ini kabur.

"Hanya ada di Indonesia di Negara +62," katanya. Netizen pun dibuat ke-

Bertalian dengan kekerasan terhadap jurnalis, data Komnas HAM sejalan dengan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Menurut data Komnas HAM, polisi dan pejabat publik jadi aktor yang paling banyak diadukan melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Ada pula personel TNI, meski angka pengaduannya relatif rendah.

Beka mengatakan, kekerasan berulang kepada jurnalis menunjukkan bahwa masalah yang ada bukan sekadar pada tataran teknis. Polisi serta pejabat publik harus memiliki pemahaman yang utuh tentang peran jurnalis dan kebebasan pers.

"Penting juga bagi aparat

kepolisian, ASN, dan pejabat publik untuk memiliki pemahaman soal posisi jurnalis, kebebasan pers, dan bagaimana peran jurnalis dan kebebasan pers terhadap penegakan demokrasi dan HAM. Ini penting menjadi penekanan," tegasnya.

Sementara berdasarkan catatan AJI, selama Mei 2020 sampai Mei 2021, dari total 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis, sebanyak 70 persen di antaranya dilakukan polisi. Pelaku lainnya, yaitu advokat, jaksa, pejabat, Satpol PP/aparat pemerintah daerah.

Dengan dominannya pelaku kekerasan dari aparat kepolisian, Sasmito berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera melakukan reformasi di tubuh Polri.

"Ada 58 kasus yang terduga pelakunya aparat polisi. Tentu ini ironi karena polisi seharusnya jadi pelindung masyarakat, termasuk jurnalis, tapi justru menjadi pelaku utama," kata Ketua Umum AJI Sasmito.

Polisi : Itu Hanya Oknum

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan meminta publik tidak menyamaratakan bahwa semua anggota Polri melakukan kekerasan. Menurutny, para pelaku kekerasan itu hanya

oknum. "Kami sedih bahwa nomor satu adalah polisi. Tapi begini, 70 persen kalau misal dari 100 itu 70 (orang). Polri itu jumlah perannya 400.000 lebih, jadi kira-kira kalau bermain matematika ada satu polisi yang melakukan kekerasan dari 20.000 (polisi), kata Ramadhan di acara yang sama. "Artinya, 199.999 masih menjadi sahabat jurnalis. Jadi mohon tidak digeneralisasi, ini adalah oknum," katanya.

Ia pun mengatakan, Polri selalu mengingatkan kepada kepolisian daerah di seluruh wilayah untuk menghormati kerja-kerja jurnalis. Ramadhan menegaskan, media dan wartawan merupakan mitra kepolisian. "Tentu upaya-upaya kami kepada daerah segera menjelaskan bahwa media adalah mitra kita. Kami menyampaikan selalu bahwa media atau wartawan melakukan tugasnya dan dilindungi UU Pers," ujarnya.

Ramadhan pun berjanji Polri akan terus berbenah diri dengan memperbaiki perilaku para anggota di lapangan. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas temuan perilaku kekerasan yang dicatat AJI. "Kami menyampaikan permohonan maaf dan tentu kami akan memperbaiki perilaku anggota di lapangan," katanya. ● lus

## 2 Kali Mangkir, Anak Anggota DPRD Bekasi Diduga Perkosa Remaja akan Dijemput Paksa

BEKASI (IM) - Anak anggota DPRD Kota Bekasi, AT (21), sudah dua kali tak menghadiri panggilan penyidik untuk diperiksa terkait kasus pemerkosaan terhadap remaja perempuan, PU (15). Hal itu dikatakan Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari saat dikonfirmasi, Senin (3/5).

"Sudah dipanggil cuma belum datang. Sudah pemanggilan kedua," ujar Erna.

Namun, Erna tak menjelaskan secara rinci jadwal pemanggilan dan alasan AT tak memenuhi panggilan untuk diperiksa soal kasus pemerkosaan itu. Namun Erna menegaskan, sesuai dengan aturan, AT akan dijemput paksa setelah tidak menghadiri panggilan kedua.

"Iya betul (akan dijemput paksa)," katanya.

Sebelumnya, keluarga PU melaporkan AT ke Polres Metro Bekasi Kota terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bekasi Kota, Senin (12/4).

Ibu korban, LF (47), membenarkan bahwa terduga pelaku merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi.

"Iya itu (terduga pelaku), anak anggota DPRD Kota Bekasi," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (14/4) lalu.

LF menjelaskan, dugaan asusila itu bermula saat putrinya memiliki hubungan cinta dengan AT. Mereka diketahui sudah berpacaran sekitar sembilan bulan.

"Jadi gini, anak saya kan berpacaran sama pelaku ada kurang lebih sembilan bulan," kata LF. Selama menjalani hubungan cinta, korban disebut kerap mendapatkan tindakan kekerasan dari terlapor. Keluarga korban yang mengetahui hal itu bermaksud melaporkan tindak kekerasan terduga pelaku ke polisi. Saat itulah korban baru membuka semua perbuatan

terduga pelaku, yang juga pernah mengajaknya bersetubuh.

Dijual ke Pria Hidung Belang

Belakangan diketahui, PU bukan hanya diperkosa AT, melainkan ada indikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). PU dijual ke pria hidung belang yang memaksa dilayani di kamar rumah kos Jalan Kinan, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi.

Informasi mengenai adanya dugaan indikasi TPPO itu terkuak setelah Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi memberikan pendampingan psikososial terhadap PU. Komisioner KPAD Kota Bekasi Novrian menjelaskan, dugaan indikasi perdagangan anak di bawah umur untuk prostitusi berawal saat korban diajak bekerja oleh terduga pelaku.

"Korban awalnya diiming-imingi kerjaan untuk menjadi pekerja di (toko) pisang goreng. Agar mempermudah kerjaan, korban diminta tinggal di kosan," kata Novrian saat dikonfirmasi, Senin (19/4).

Namun, pekerjaan yang ditawarkan korban tidak pernah ada. Terduga pelaku mengatakan kepada korban bahwa pekerjaan itu sudah diisi orang lain.

"Dari situ korban diduga diperkosa, kemudian baru dilakukan itu (dijual)," kata Novrian.

Terduga pelaku menjual korban kepada pria hidung belang melalui aplikasi media sosial MiChat. Adapun aplikasi media sosial tersebut diduga dioperasikan oleh AT dengan menggunakan foto korban.

"Untuk tarifnya itu Rp 400.000. Dari pengakuan korban, semua uang dipegang oleh terduga pelaku," kata Novrian.

Berdasarkan pengakuan PU kepada KPAD, dia dipaksa melayani pria hidung belang empat hingga lima dalam satu hari. ● lus



## PENGETATAN PERGERAKAN DI JALUR PANTURA

Petugas kepolisian memeriksa kelengkapan surat perjalanan pengendara di Exit Tol Setono, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (3/5). Pemeriksaan jalur mudik oleh petugas gabungan tersebut dilakukan untuk pengetatan pergerakan warga jelang pelarangan masa mudik pada 6-17 Mei 2021 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.